



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

#### **BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	:	10 ( <i>sepuluh</i> )
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero)
Hari, Tanggal	:	Senin, 29 Juni 2020
Pukul	:	09.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun Anggaran 2020
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, beserta jajarannya.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada pukul 10.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 29 Juni 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara Fisik dan virtual.

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan pencairan hutang pemerintah ke PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.45.000.000.000.000-** (*Empat Puluh Lima Triliun Rupiah*) yang berupa kompensasi selisih harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Premium Tahun 2017 dan sebagian Tahun 2018, belum termasuk *cost of fund*.
2. Komisi VI DPR RI akan membahas terkait Pencairan Hutang Pemerintah ke BUMN Tahun 2017 dan sebagian Tahun 2018 kepada PT Pertamina (Persero) pada rapat Pleno Komisi VI DPR RI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN sekaligus Komisi VI DPR RI juga akan meminta kepada Pemerintah agar pembayaran kewajibannya dapat dilakukan dalam setiap tahun anggaran.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN strategis di bidang energi yang menjalankan eksekusi atas kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam bidang minyak dan gas untuk menjelaskan *road map* yang lebih detail terkait dengan perubahan struktur organisasi termasuk beberapa *sub holding*, sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VI dapat lebih efektif.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk membuat rencana pengembangan SDM yang lebih efektif dan sesuai dengan program reformasi perusahaan, sehingga memiliki sumber daya manusia yang unggul dan handal dalam pengembangan korporasi di masa yang akan datang.
5. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan efisiensi baik melalui *refinery* lama maupun pembangunan *refinery* baru dan pengembangan produk-produk hilir yang terintegrasi.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) terkait dengan pembentukan *Sub Holding Shipping* agar dapat digunakan secara strategis untuk menumbuhkan dan meningkatkan kapabilitas industri perkapalan nasional.
7. Komisi VI DPR RI meminta untuk memastikan distribusi BBM yang lebih handal dengan membangun infrastruktur penjualan (SPBU) dan *storage* (tangki-tangki) distribusi yang lebih memadai.
8. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan *lifting* di sumur-sumur *existing* maupun terhadap lapangan baru, termasuk mempercepat proses akuisisi.
9. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

\*Catatan:

- a. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan PT Pertamina (Persero) untuk memasukkan komponen *cost of fund* dalam pencairan hutang pembayaran subsidi kepada Pertamina agar tercipta iklim usaha yang *fair* sehingga keterlambatan pembayaran tidak terulang kembali.
- b. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) agar melakukan kajian yang mendalam mengenai reformasi subsidi BBM yang meliputi data penerima manfaat, model penyaluran subsidi yang efisien dan tepat sasaran, perhitungan angka subsidi yang sesuai dan mekanisme pembayaran yang tepat waktu dan akuntabel.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.47 WIB.

Jakarta, 29 Juni 2020  
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,

TTD.

ARIA BIMA  
A-189